

# **RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**



*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
yang Profesional, Andal dan Kredibel  
Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan  
Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas izin-Nya telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan Ketiga sebagai hasil dari evaluasi dan *review* Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018, menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018 hasil *review* dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, serta hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat dan Kementerian PAN dan RB.

Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan Ketiga ini disusun untuk memberikan arah dan menjadi acuan bagi seluruh komponen Bappeda dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi sesuai dengan visi Bappeda Kota Bekasi, yaitu **"Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional, Andal dan Kredibel Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan"**.

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan Ketiga ini telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Bappeda Kota Bekasi yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan Ketiga ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan Ketiga ini masih terdapat kekurangan dan perlu penyempurnaan serta masukan untuk perbaikan selanjutnya. Untuk itu, kami mohon masukan dan saran untuk penyempurnaan Renstra Perubahan ini agar menjadi lebih baik di masa mendatang.

Bekasi,

2017

KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI

Ir. A. KOSWARA, M.P.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19680405 199703 1 005

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>8</b>
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8
2.2	Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27
2.3	Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36
<b>BAB III</b>	<b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	<b>38</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	38
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	42
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	50
<b>BAB IV</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	<b>52</b>
4.1	Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	52
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55
4.3	Strategi dan Kebijakan	58
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	<b>61</b>
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN PENUTUP SASARAN RPJMD</b>	<b>100</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kreativitas masing-masing. Hal ini dilakukan pemerintah daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah Daerah diberikan amanat untuk menyusun Dokumen Rencana Jangka Panjang (RPJP), dokumen Rencana Jangka Menengah (RPJM) dan dokumen rencana tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP). Sementara Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah (SKPD) diamanatkan untuk menyusun Dokumen Rencana Jangka Menengah (Rencana Strategis/Renstra) dan Rencana Tahunan (Renja).

Rencana Jangka Menengah SKPD adalah dokumen rencana strategis untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah. Rencana strategis tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi dalam mencapai sasaran dan target yang telah

ditetapkan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi organisasi. Rencana strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak terkait dan berkepentingan dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis.

Rencana strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Rencana strategis membantu pengambil keputusan dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, rencana strategis tersebut minimal harus mencakup kebijakan strategi dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial.

Proses penyusunan Rencana Strategis mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan Rencana Strategis ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan semua pihak dalam pembuatan Rencana Strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan rencana strategis secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas pokok di bidang perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi telah menyusun suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam periode lima tahun dari tahun 2013-2018. Rencana Strategis Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kota yaitu



RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018, dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bekasi, yaitu **“Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”**.

Pada tahun 2015, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 dilakukan *review* karena banyak perubahan dan dinamika lingkungan, baik lingkungan eksternal (provinsi, nasional, regional dan internasional) maupun lingkungan internal Kota Bekasi, yang harus direspon dalam berbagai penyesuaian perencanaan pembangunan di lingkungan Kota Bekasi. Oleh karena itu, Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 juga dilakukan *review* dan ditindaklanjuti dengan menyusun Renstra perubahan. Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Nomor 050/Kep.184-Bappeda/V/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor 050/Kep.790-Bappeda/XII/2013 tentang Rencana Strategis Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 tanggal 25 Mei 2016.

Namun, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi pada 31 Oktober 2016, maka Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan harus dilakukan penyesuaian atau perubahan kembali.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
16. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
17. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 58 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2013-2018;

18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
19. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 050.6/Kep.378-Bappeda/VI/2016 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan dokumen Renstra SKPD untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang berisi langkah- langkah strategis lima tahunan SKPD dalam mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD adalah :

1. Untuk mengarahkan pelayanan SKPD dalam jangka waktu 5 tahun ke depan;
2. Menyediakan acuan resmi bagi SKPD dalam menentukan prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan SKPD, dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai SKPD dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD;
4. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi, dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (stakeholders);
5. Menyediakan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan SKPD;
6. Memelihara kesinambungan proses dan hasil- hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD.



**1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN PENUTUP SASARAN  
RPJMD**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah, dimana dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu fungsi utama Manajemen Pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (*resources*) yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang efisien dan efektif sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, Bappeda Kota Bekasi merumuskan kembali tugas pokok sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bappeda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara holistik-tematik, integratif dan spasial;
- d. penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek (RKPD);
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang;

- f. sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik yang bersifat vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional;
- h. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- i. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. pembinaan administrasi perkantoran;
- k. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Kepegawaian Daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
- l. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
- m. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- n. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- p. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris dan empat Bidang yaitu Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, serta Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Di samping itu, Kepala Badan dibantu oleh satu Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pengolahan Data.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Badan;
2. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Badan berdasarkan pada visi dan misi Badan;
3. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
4. Pengoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan penyelenggaraan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kota Bekasi;
5. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Badan;
6. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Badan;
7. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Badan;
8. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
9. Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
10. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Badan secara berkala;
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan.

Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah, melaksanakan evaluasi, pengendalian atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang meliputi Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan program Pembangunan Daerah serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Program Kerja Dan Rencana Kegiatan Bidang;
2. Perumusan Kebijakan, Petunjuk Teknis Serta Rencana Strategis Sesuai Lingkup Bidang Tugasnya;

3. Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Jangka Panjang (RPJPD), Jangka Menengah (RPJMD), Dan Jangka Pendek (RKPD) Dari Bidang-Bidang Menjadi Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Kota Bekasi;
  4. Pengkajian Dan Penyusunan Analisa Kerangka Ekonomi Makro Daerah (Perencanaan Ekonomi Dan Indikator Ekonomi) Melalui Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, Dan Spasial;
  5. Pengoordinasian Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Model Ekonomi;
  6. Pengoordinasian Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Ekonomi Makro Daerah;
  7. Pengintegrasian Dan Harmonisasi Program-Program Pembangunan Di Daerah;
  8. Perumusan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah;
  9. Penyusunan Dan Perumusan Analisa Rancangan Kebijakan Kewilayahan;
  10. Pengoordinasian Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Model Kewilayahan Serta Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Holistik-Tematik, Integratif, Dan Spasial Yang Berbasis Pada Pengembangan Kewilayahan;
  11. Pengkajian, Pengoordinasian Dan Perumusan Rancangan RTRW Daerah;
  12. Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Bersifat Umum Dan Makro Untuk Mengetahui Pencapaian Outcome Dan Impact Program Pembangunan Daerah, Serta Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  13. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
  14. Pelaporan Hasil Evaluasi Program Pembangunan Daerah;
  15. Pengumpulan Dan Analisis Data Statistik Serta Informasi Pembangunan Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah;
  16. Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Pelaksanan Tugas Dengan Perangkat Daerah Terkait;
  17. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Dalam Lingkup Tugasnya;
  18. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lainnya Sesuai Perintah Kepala Badan;
  19. Penyiapan Bahan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepada Kepala Badan.
- Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan membawahi :
- a. Sub Bidang Analisis Pembangunan Daerah;



- b. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah;
- c. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat, penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, perencanaan, fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah), fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat Daerah, dan kecamatan), fungsi pembinaan dan pengawasan, serta Sekretariat DPRD untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat, penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, perencanaan, fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah), fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat Daerah, dan kecamatan), fungsi pembinaan dan pengawasan, serta Sekretariat DPRD secara holistik-tematik, integratif, dan spasial;
4. penyusunan rancangan strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan urusan sosial,

kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat, penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, perencanaan, fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah), fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat Daerah, dan kecamatan), fungsi pembinaan dan pengawasan, serta Sekretariat DPRD di dalam rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

5. penyiapan bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat, penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, perencanaan, fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah), fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat Daerah, dan kecamatan), fungsi pembinaan dan pengawasan, serta Sekretariat DPRD;
6. penyiapan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat, penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, perencanaan, fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah), fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat Daerah, dan kecamatan), fungsi pembinaan dan pengawasan, serta Sekretariat DPRD;

7. verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat, penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, perencanaan, fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah), fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat Daerah, dan kecamatan), fungsi pembinaan dan pengawasan, serta Sekretariat DPRD;
8. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat, penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, perencanaan, fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah), fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat Daerah, dan kecamatan), fungsi pembinaan dan pengawasan, serta Sekretariat DPRD;
9. pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat, penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, perencanaan, fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah), fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa

- dan politik, Sekretariat Daerah, dan kecamatan), fungsi pembinaan dan pengawasan, serta Sekretariat DPRD;
10. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah (swasta, organisasi non pemerintah, universitas) urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat, penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, perencanaan, fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah), fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat Daerah, dan kecamatan), fungsi pembinaan dan pengawasan, serta Sekretariat DPRD;
  11. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Bekasi urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat, penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, perencanaan, fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah), fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat Daerah, dan kecamatan), fungsi pembinaan dan pengawasan, serta Sekretariat DPRD;
  12. pengendalian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat, penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, perencanaan, fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang

dan jasa pemerintah), fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat Daerah, dan kecamatan), fungsi pembinaan dan pengawasan, serta Sekretariat DPRD;

13. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat, penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, perencanaan, fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah), fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat Daerah, dan kecamatan), fungsi pembinaan dan pengawasan, serta Sekretariat DPRD;
14. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
15. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
16. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahkan :

- a. Sub Bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Trantibum Linmas, dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Tenaga Kerja, Perpustakaan, dan Kearsipan;
- c. Sub Bidang Pemerintahan.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan pangan, serta fungsi penunjang urusan keuangan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan pangan, serta fungsi penunjang urusan keuangan secara holistik-tematik, integratif, dan spasial;
4. penyusunan rancangan strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan pangan, serta fungsi penunjang urusan keuangan di dalam rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. penyiapan bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan pangan, serta fungsi penunjang urusan keuangan;
6. penyiapan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan pangan, serta fungsi penunjang urusan keuangan;
7. verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan pangan, serta fungsi penunjang urusan keuangan;
8. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan pangan, serta fungsi penunjang urusan keuangan;
9. pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan



panjang urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan pangan, serta fungsi penunjang urusan keuangan;

10. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah (swasta, organisasi non pemerintah, universitas) urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan pangan, serta fungsi penunjang urusan keuangan;
11. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Bekasi urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan pangan, serta fungsi penunjang urusan keuangan;
12. pengendalian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan pangan, serta fungsi penunjang urusan keuangan;
13. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian dan pangan, serta fungsi penunjang urusan keuangan;
14. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
15. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
16. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan :

- a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. Sub Bidang Penanaman Modal dan Keuangan;
- c. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian dan Pangan.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan

kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, serta penunjang urusan penelitian dan pengembangan dan dalam rangka penanggulangan bencana untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, serta penunjang urusan penelitian dan pengembangan dan dalam rangka penanggulangan bencana secara holistik-tematik, integratif, dan spasial;
4. penyusunan rancangan strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, perumahan urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, serta penunjang urusan penelitian dan pengembangan dan dalam rangka penanggulangan bencana di dalam rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. penyiapan bahan untuk pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, serta penunjang urusan penelitian dan pengembangan dan dalam rangka penanggulangan bencana;
6. penyiapan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, komunikasi dan

- informatika, statistik, persandian, serta penunjang urusan penelitian dan pengembangan dan dalam rangka penanggulangan bencana;
7. verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, serta penunjang urusan penelitian dan pengembangan dan dalam rangka penanggulangan bencana;
  8. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, serta penunjang urusan penelitian dan pengembangan dan dalam rangka penanggulangan bencana;
  9. pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, serta penunjang urusan penelitian dan pengembangan dan dalam rangka penanggulangan bencana;
  10. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah (swasta, organisasi non pemerintah, universitas) urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, serta penunjang urusan penelitian dan pengembangan dan dalam rangka penanggulangan bencana;
  11. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Bekasi urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, serta penunjang urusan penelitian dan pengembangan dan dalam rangka penanggulangan bencana;

12. pengendalian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, serta penunjang urusan penelitian dan pengembangan dan dalam rangka penanggulangan bencana;
13. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, serta penunjang urusan penelitian dan pengembangan dan dalam rangka penanggulangan bencana;
14. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
15. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
16. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :

- a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi: dan
- b. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.

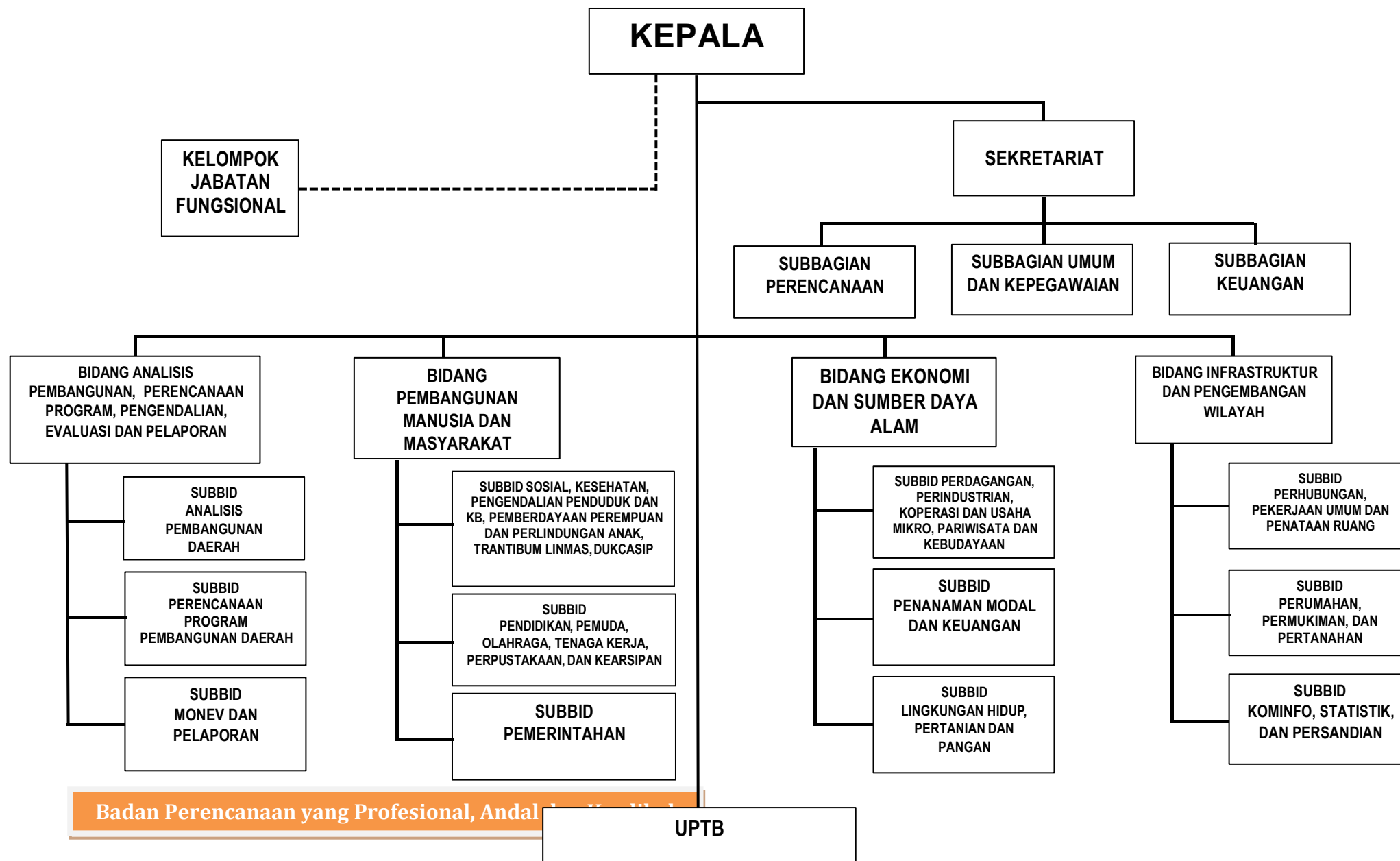
UPTB Pengolahan data mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis Bappeda terkait pengolahan data dan informasi pembangunan daerah. Untuk menjalankan tugas tersebut mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan UPTB;
2. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis terkait pengelolaan data dan analisa data pembangunan daerah;
3. Penyusunan dan pengolahan data hasil perencanaan pelaksanaan pembangunan;
4. Penyiapan data bahan perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
5. Pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
6. Pelaksanaan kerjasama pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTB;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas UPTB;
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas UPTB kepada kepala badan.
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Analisis Pembangunan Daerah;
  - b. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah;
  - c. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Trantibum Linmas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan, dan Kearsipan;
  - c. Sub Bidang Pemerintahan.
5. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro, Pariwisata dan Kebudayaan;
  - b. Sub Bidang Penanaman Modal dan Keuangan;
  - c. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian dan Pangan.
6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. Sub Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan;
  - c. Sub Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.
7. UPTB;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA BEKASI





Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Bekasi yang tertuang dalam Peraturan Walikota Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi merupakan penjabaran dari beban pekerjaan dan tugas-tugas yang diamanatkan oleh perundang-undangan yang meliputi aspek perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi serta koordinasi, yaitu:

**1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)**

Dalam Undang-undang ini diatur beberapa tugas Kepala Bappeda, yaitu:

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- b. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penyusunan RKPD
- c. Menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan kewenangannya (pasal 28)
- d. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (pasal 29)

**2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam Undang-Undang ini diantaranya mengatur tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu:

- a. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (Pasal 260 ayat 1)
- b. Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah (Pasal 260 ayat 2).

- c. Pasal-pasal lain yang secara eksplisit mengatur perencanaan pembangunan daerah antara lain pada pasal 262, pasal 263 dan pasal 274.

### **3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tugas Bappeda adalah mensinkronkan perencanaan spasial dengan sektoral, termasuk dalam melakukan pelayanan perijinan.

### **4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah**

Dalam Pasal 46 ayat 5, salah satu unsur penunjang urusan pemerintahan adalah perencanaan. Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa Badan Daerah kabupaten/kota merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota; ayat (2) Badan Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota; ayat (3) Badan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Selain tugas-tugas yang tercantum di atas, Bappeda juga melakukan tugas koordinasi yang meliputi:

- a. Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

- b. Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang meliputi unsur pimpinan DPRD, semua fraksi, semua komisi, panitia musyawarah, panitia khusus;
- c. Koordinasi dengan semua tingkatan pemerintahan (Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementrian/Lembaga);
- d. Koordinasi dengan semua pengelola sumber dana (APBN/loan/hibah, dana masyarakat/dunia usaha dalam skema kemitraan/*partnership*);
- e. Koordinasi dengan semua SKPD;
- f. Koordinasi kerjasama antar daerah dalam lingkup regional, dan nasional;
- g. Koordinasi membangun perencanaan partisipatif dengan masyarakat/dunia usaha; dan
- h. Koordinasi membangun kemitraan untuk efektivitas pembiayaan pembangunan dengan pihak swasta.

Dalam menjalankan tugas seperti yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, Bappeda Kota Bekasi sebagai lembaga perencana pada posisi yang strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Kebijakan pembangunan yang dirumuskan dan produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan oleh Bappeda Kota Bekasi merupakan hasil proses perencanaan melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif dan *Top Down Bottom up*.

- **Proses Politik**, dalam sistem perencanaan ini terkait dengan penjabaran agenda pembangunan daerah baik Jangka Panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM) dan tahunan (RKP). Pada proses ini, DPRD dilibatkan dalam menyusun agenda pembangunan Kota Bekasi.
- **Proses Teknokratik**, yaitu proses perencanaan yang dilaksanakan melalui penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Pada proses ini, Bappeda yang secara fungsional bertugas menyusun perencanaan pembangunan daerah

melibatkan pakar-pakar atau tenaga ahli baik dari perguruan tinggi maupun dari profesi lainnya.

- **Proses Partisipatif**, yaitu suatu proses perencanaan berbasis partisipasi masyarakat. Proses ini diwujudkan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan kota, masyarakat dan seluruh pihak berkepentingan (*stakeholder*) dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan yang menjadi aspirasi masyarakat sekaligus menjadi sarana komunikasi antar berbagai pelaku pembangunan (pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat) dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan daerah.
- **Proses Top Down Bottom Up**, yaitu suatu proses perencanaan dengan memperhatikan perencanaan pada tingkat Pemerintahan. Proses ini dilakukan untuk menyelaraskan program-program agar dapat menjamin sinergitas dari semua kegiatan pemerintah dan masyarakat pembangunan antar daerah dan antar tingkat Pemerintahan. Penyelarasan rencana-rencana lembaga pemerintah dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan yang dilaksanakan baik ditingkat Kota, Provinsi maupun Tingkat Pusat.

## **2.2. Sumber Daya Bappeda**

Bappeda Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh 92 orang personil yang terdiri 42 orang laki-laki dan 50 orang perempuan. Secara kuantitas aparatur Bappeda sudah cukup memadai, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan seperti sarjana informatika, sarjana ekonomi pembangunan, sarjana manajemen strategis, sarjana planologi, sarjana teknik sipil dan sarjana statistik. Dalam tabel dibawah ini disampaikan Sumber Daya Bappeda Kota Bekasi berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, golongan dan pendidikan.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Bappeda Kota Bekasi**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan**  
**Tahun 2015**

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JML	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN					GOLONGAN			
			PRIA	WANITA	S3	S2	S1	D3	SLTA	IV	III	II	I
1	PEGAWAI NEGERI	69	28	41	1	16	35	7	10	13	44	12	-
2	TENAGA KONTRAK	23	14	9	-	-	12	2	9	-	-	-	-
	TOTAL	92	42	50	1	16	47	9	19	13	44	12	-

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian

Dari sisi prasarana, Bappeda Kota Bekasi sudah memiliki kantor sendiri. Untuk mobilitas, Bappeda Kota Bekasi memiliki 14 unit mobil, yaitu 1 unit untuk Kepala Bappeda, 1 unit untuk Sekretaris, 4 unit untuk Kepala Bidang dan 6 unit untuk Kasubag/Kasubid (tahun 2015). Sementara untuk kendaraan dinas berupa sepeda motor terdapat 13 unit motor (tahun 2015). Ketersediaan kendaraan dinas untuk mendukung mobilitas sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas Bappeda karena setiap Kepala Subbidang dituntut setiap saat ke lapangan, baik untuk berkoordinasi maupun untuk mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja Bappeda Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Dalam Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2008-2013 terdapat 4 (empat) sasaran strategis harus dicapai oleh Bappeda Kota Bekasi sebagaimana dalam tabel di bawah berikut.

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Renstra Bappeda Kota Bekasi**  
**Tahun 2008 – 2013**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Aplikatif	Tersedianya Dokumen Perencanaan
		- RPJPD
		- RPJMD
		- RKPD
		- KUA-PPA
		- RTRW
2.	Tersedianya Data Pembangunan Daerah yang Valid dan Mutakhir	Jenis Data Pembangunan Daerah
		- Bekasi Dalam Angka
		- Data Spasial Pembangunan
		- Indikator Makro Ekonomi
3.	Tersedianya Aparatur Perencana yang Memenuhi Kebutuhan, Tuntutan Kompetensi Jabatan dan Peningkatan Produktifitas	Persentase Aparatur yang Kompeten
4.	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang Memadai	Prosentase Sarana dan Prasarana Yang Representatif Dan Memadai Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Organisasi



**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

Gambaran capaian kinerja Bappeda Kota Bekasi dalam kurun waktu 2008-2013 dapat dilihat dalam tabel 2.5 berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Bekasi Tahun 2008 - 2013**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN (%) TAHUN KE-					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	<b>Tersedianya Dokumen Perencanaan :</b>																		
	- Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	1	-	1	-	-		1	-	-	1	-	-	100	-	-	100	-	-
	- Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	100	-
	- Tersedianya Dokumen KUA-PPAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	100	-
	- Dokumen RTRW	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
2	<b>Jenis Data Pembangunan Daerah :</b>																		

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

NO	INDIKATOR KINERJA		TARGET RENSTRA TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN (%) TAHUN KE-					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	-	Bekasi Dalam Angka	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	100	-
	-	Indikator Makro Ekonomi	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	100	-
	-	Data Spasial Pembangunan	1	1	1	2	3	3	1	1	1	2	3	-	100	100	100	100	100	-
3	Persentase Aparatur Yang Kompeten		32%	31%	25%	42%	47%	57%	32%	31%	25%	42%	47%	-	100	100	100	100	100	-
4	Prosentase Sarana Dan Prasarana Yang Representatif Dan Memadai Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan		79%	79%	79%	79%	90%	90%	79%	79%	79%	79%	90%	-	100	100	100	100	100	-

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Bappeda Kota Bekasi dalam tiap tahunnya telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kota Bekasi Tahun 2008-2013. Rasio capaian dari empat sasaran strategis adalah 100% dalam tiap tahunnya.

Dalam mencapai target sasaran tersebut, Bappeda Kota Bekasi melaksanakan beberapa program. Mengacu pada RPJMD Tahun 2008-2013. Rencana Strategis Bappeda Kota Bekasi 2008- 2013 menetapkan program-program sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
3. Program Perencanaan Sosial Budaya;
4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; dan
5. Program Pengembangan Data/Informasi;

Sementara kinerja pengelolaan pendanaan mulai tahun 2008 sampai tahun 2012, diuraikan dalam tabel berikut ini:

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Kota Bekasi Tahun 2008-2012**

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN (dalam juta rupiah)					REALISASI TAHUN (dalam juta rupiah)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (dalam juta rupiah)	
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	Rp	REALISASI
1	Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan	-	332,5	-	-	-	-	326,5	-	-	-	0	98.2	0	0	0	-	-
2	Program Pengendalian Banjir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
3	Program Pengembangan Perumahan	-	380	-	-	-	-	378,8	-	-	-	0	99.6	0	0	0	-	-
4	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	-	60	-	-	-	-	56	-	-	-	0	93.3	0	0	0	-	-
5	Program Perencanaan Tata Ruang	-	350	-	-	-	-	281,1	-	-	-	0	80.3	0	0	0	-	-
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.047,6	947,9	761,7	1.219,9	1.590,3	955,4	877,1	718,9	1.067,9	1.466,2	91.1	92.5	94.3	87.5	92.1	135.7	127.0
7	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	296,1	285,3	255,3	313,5	439,47	271,8	252,4	232,3	307,3	354,8	91.7	88.4	90.9	98,0	80,7	35.9	20.8
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22,7	27,75	-	31,5	60,125	21	23,65	-	30,8	59,3	92.5	88.5	0	97.7	98.6	9.4	9.6
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	110	110	7,5	153	25	106,9	93	7,5	52,9	5,25	97.1	84.5	100	34.5	21.0	-21	-25
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	123,2	133,2	170	150	200	121,9	133,2	170	143,5	198,3	98.9	100	100	95.6	99.2	19.2	19.0

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN (dalam juta rupiah)					REALISASI TAHUN (dalam juta rupiah)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (dalam juta rupiah)	
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	Rp	REALISASI
11	Program Pengembangan Data/Informasi	1.250	1.150	350	600	1.135	1.227,7	1.043,3	338,8	486,5	1.077,1	98.2	90.7	96.8	81.0	94.8	283.4	-37.7
12	Program Kerjasama Pembangunan	300	-	-	-	-	273,75	-	-	-	-	91.3	0	0	0	0	-	-
13	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1.450	-	-	-	-	1.373,1	-	-	-	-	94.6	0	0	0	0	-	-
14	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar	2.425	-	-	-	-	2.304,4	-	-	-	-	95.0	0	0	0	0	-	-
15	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	250	770	340	900	1.075	87,695	758,1	312,4	860,3	656,2	35.0	98.4	91.8	95.5	61.0	-62.2	142.1
16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.045	4.027	3.610,3	3.690	5.270	3.532,2	3.976,6	3.507,1	3.271,8	4.543,6	87.3	98.7	97.1	88.6	86.2	-1009.	252.9
17	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2.987	1.195	1.168,6	1.225	850	2.829,8	1.113,8	1.056,7	1.166,3	757,6	94.7	93.2	90.4	95.2	89.1	-534.3	-518.0
18	Program Perencanaan Sosial Budaya	1.265	1.050	1,187,7	1.050	1.550	981,4	1.015,4	1.096,9	865,9	1.369,2	77.5	96.7	92.3	82.4	88.3	-315.9	96.9
19	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	-	682,5	2.840,6	2.630	3.860	-	672,5	-	2.559,4	3.504,2	0	98.5	0	97.3	90.7	0.97	876.0
20	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	500	-	-	-	-	476,7	-	-	-	-	95.3	0	0	0	0	-	-
21	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	475	300	-	-	-	456,9	286,39	-	-	0	96.2	95.5	0	0	-	-
22	Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan	-	129,8	-	-	400	-	119,3	-	-	392,1	0	91.9	0	0	90.0	-	-

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN (dalam juta rupiah)					REALISASI TAHUN (dalam juta rupiah)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (dalam juta rupiah)	
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	Rp	REALISASI
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur																	
	Belanja Program	14.472	10.601,8	9.797,2	10.095	14.140	12.086,7	10.198,3	6.598,3	9.210,2	11.907,9						179,2	151,4
	Belanja Non-Program	1.599,6	1.504,15	1.194,5	1.867,9	2.314,9	1477	2.379,3	1.128,7	1.602,4	2.083,9						-1.673,03	812,2
	Total Belanja Program + Non Program	16.071,6	12.105,9	10.991,7	11.962,9	16.454,9	13.563,7	12.577,6	7.727	10.812,6	13.991,8						692,1	550,2

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tantangan adalah suatu kondisi yang datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan. Tantangan Bappeda Kota Bekasi dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan regional, nasional, maupun global serta saling pengaruh antara berbagai faktor di dalamnya merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya daya saing wilayah sekitar menuntut percepatan pembangunan di segala bidang;
3. Meningkatkan koordinasi dan keselarasan kegiatan pembangunan perencanaan pembangunan dengan SKPD, lintaswilayah dalam lingkup regional dan nasional;
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap produk perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
5. Masih adanya kebijakan pembangunan daerah yang seringkali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama masyarakat miskin;
6. Penyediaan dan *update* data hasil pembangunan yang dilakukan oleh SKPD, sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Selain tantangan-tantangan seperti diuraikan di atas, terdapat pula peluang-peluang yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Bappeda Kota Bekasi yaitu:

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan daerah ke arah yang lebih demokratis dan otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peran Bappeda sebagai perencana semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal, pendidikan latihan dalam dan luar negeri bagi pegawai.



### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan organisasi. Isu-isu strategis Bappeda Kota Bekasi dirumuskan berdasarkan permasalahan, tantangan dan potensi ke depan. Isu-isu strategis tersebut menjadi acuan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bekasi.

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan**

#### **Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Bekasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Bekasi adalah sumber daya yang dimiliki Bappeda, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi dan misi. Namun, masih ditemui beberapa permasalahan di internal Bappeda Kota Bekasi, antara lain :

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah Kota Bekasi;
2. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi;
3. Belum optimalnya pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi; dan
4. Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan data perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi.

Selain faktor internal di atas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Bekasi. Faktor-faktor eksternal yang dimaksud antara lain:

1. Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen terkait, Perda maupun peraturan-peraturan lainnya. Dengan berubahnya landasan/acuan hukum, disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

2. Sumber Daya Manusia

Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan daerah yang lebih berkualitas, masih belum memadai. SKPD diharapkan dapat menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas secara memadai.

**3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi *input* bagi perumusan isu-isu strategis SKPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi terpilih untuk periode Tahun 2013–2018 adalah **“Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan.”** Dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota.
3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya.
4. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, peningkatan Investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai.

Ditinjau dari misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi terpilih, misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Bekasi adalah misi ke-1 yaitu **Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**. Berdasarkan penelaahan terhadap misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi dan permasalahan pelayanan SKPD, dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi sebagaimana digambarkan dalam tabel 3.1. berikut ini :

**Tabel 3.1**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

VISI : BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN				
NO	MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
I	<b>Misi 1 :</b> Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	1. Adanya ego atau kepentingan antarsektor yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan	1. Meningkatnya koordinasi integrasi, dan perencanaan sinkronisasi pembangunan daerah Kota Bekasi;

VISI : BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN				
NO	MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	daerah Kota Bekasi;  2. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi.	koordinasi, sehingga persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya;	2. Meningkatnya kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;
2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			
3	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya			
4	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		2. Belum optimalnya mekanisme perencanaan yang baik antara Bappeda, SKPD dengan legislatif daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi;  3. Kurangnya tingkat pemahaman dari SKPD untuk melaksanakan program dan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun RKPD Kota Bekasi;  4. Keterbatasan data hasil pelaksanaan program dan kegiatan.	3. Terbangunnya sistem aplikasi perencanaan pembangunan ( <i>e-planning</i> );  4. Terbangunnya sistem aplikasi pengendalian dan evaluasi ( <i>e-monev</i> ) yang terintegrasi dengan sistem aplikasi perencanaan pembangunan ( <i>e-planning</i> ).
5	Program Pengembangan Data/Informasi			
6	Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan			

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi yang masih berlaku menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis SKPD yang akan ditangani pada Renstra SKPD Kabupaten/Kota periode berikutnya.

Renstra K/L terkait Bappeda yang ditelaah adalah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2010-2014, yang telah mengalami perubahan dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2014.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN 2010-2014 dan mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, dalam Rencana Strategis Tahun 2010–2014, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan visi yaitu **“Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara.”**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang; dan
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas;
2. Terwujudnya koordinasi kebijakan pembangunan lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas; dan
3. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas.

Sasaran strategis untuk ketiga tujuan Kementerian PPN/Bappenas periode tahun 2010-2014 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis dari tujuan pertama: “Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah:
  - a. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
  - b. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap RPJMN 2010-2014; dan
  - c. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap RKP.
2. Sasaran Strategis dari tujuan kedua: “Terwujudnya koordinasi kebijakan pembangunan lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas”, adalah: Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan lainnya.
3. Sasaran Strategis dari tujuan ketiga: “Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas”, adalah terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas.

Ditinjau dari sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut di atas, sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas baik yang pertama, kedua maupun ketiga memiliki keselarasan dengan pencapaian sasaran Renstra Bappeda Kota Bekasi. Sasaran strategis pertama yaitu “Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas” sangat selaras dengan tugas dan fungsi Bappeda Kota Bekasi, yaitu melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sebagaimana tertuang di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 51 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi. Demikian pula dengan sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas yang kedua dan ketiga sangat selaras dengan tugas dan fungsi Bappeda Kota Bekasi yaitu dalam hal koordinasi kebijakan pembangunan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Berdasarkan penelahaan terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014 dan permasalahan pada Bappeda Kota Bekasi dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong sebagaimana digambarkan dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2

**Permasalahan Bappeda Kota Bekasi Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	PERMASALAHAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA BEKASI	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	<p>Sasaran Strategis dari tujuan pertama: “Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah:</p> <p>a. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, dan antar-fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;</p> <p>b. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terhadap RPJMN 2010-2014; dan</p> <p>c. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) terhadap RKP.</p>	Dokumen rencana pembangunan nasional dan provinsi belum diacu secara konsisten.	Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan pusat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk menyusun dan menerapkan kebijakan/program secara komprehensif dan terpadu;</li> <li>2. Peningkatan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan.</li> </ol>



**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	PERMASALAHAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA BEKASI	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
2.	Sasaran Strategis dari tujuan kedua: “Terwujudnya koordinasi kebijakan pembangunan lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas”, adalah: Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan lainnya.	Peran Bappeda Kota Bekasi dalam mengoordinasikan kebijakan pembangunan daerah masih belum optimal.	Masih terbatasnya kapasitas aparatur Bappeda Kota Bekasi dalam mengoordinasikan kebijakan pembangunan daerah.	Peningkatan kapasitas aparatur Bappeda Kota Bekasi dalam berkoordinasi dengan pusat dan SKPD terkait kebijakan pembangunan.
3.	Sasaran Strategis dari tujuan ketiga: “Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas”, adalah: Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya SDM yang kompeten dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah Kota Bekasi;</li> <li>2. Belum optimalnya pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi; dan</li> <li>3. Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan data perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM di Kota Bekasi;</li> <li>2. Masih rendahnya komitmen SKPD terkait pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dalam peningkatan kapasitas kelembagaan di daerah;</li> <li>2. Berkembangnya sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan.</li> </ol>

Renstra provinsi terkait Bappeda yang ditelaah adalah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Bappeda Provinsi Jawa Barat menetapkan visi yaitu **"Tercapainya Kualitas dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat"**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan 4 (empat) misi Bappeda Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, akuntabel, dan transparan;
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
3. Mewujudkan sinergi tata ruang wilayah;
4. Mewujudkan sumberdaya aparatur yang profesional dan memiliki integritas.

Visi dan misi Bappeda Provinsi Jawa Barat tersebut selaras dengan visi dan misi Bappeda Kota Bekasi.

Di samping itu, isu-isu strategis di Provinsi Jawa Barat yang terkait antara lain:

- a. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang profesional;
- b. Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja;
- c. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat.

Isu-isu strategis di Provinsi Jawa Barat tersebut juga selaras dengan isu/permasalahan di Kota Bekasi, khususnya di Bappeda Kota Bekasi, baik dari sisi kelembagaannya maupun dari SDM-nya.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan tinjauan terhadap kebijakan tata ruang wilayah makro yang tertuang baik dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi Jawa Barat, RTRW Kawasan Tertentu Jabotabek, dan posisi wilayah Kota Bekasi yang

berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta, berbagai kebijakan pembangunan di Kota Bekasi berorientasi untuk kepentingan nasional.

Dalam struktur tata ruang wilayah makro, Kota Bekasi diarahkan pengembangannya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sekaligus menjadi bagian dari kawasan pengimbang (*counter magnet*) DKI Jakarta. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan utama yang diarahkan pengembangannya adalah jasa, perdagangan, industri, dan permukiman. Kebijakan pembangunan tersebut umumnya sangat strategis dan dominan, sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan pembangunan di Kota Bekasi.

RTRW Kawasan Jabotabek dijabarkan ke dalam RTRW DKI Jakarta dan RTRW Kota/Kabupaten Tangerang, Bogor, dan Bekasi dengan tetap memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Barat. Pada sisi lain, RTRW Kawasan Jabotabek juga akan diakomodasikan ke dalam RTRW Provinsi Jawa Barat, agar tercapai juga sinergi di antara Jawa Barat dan Jabotabek.

RTRW Kota Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 memuat peruntukan ruang di wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di masa mendatang.

Permasalahan yang muncul dan mengemuka saat ini adalah terkait lingkungan hidup, dimana terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang berdampak pada kehidupan manusia dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, isu lingkungan hidup penting untuk diintegrasikan di dalam dokumen perencanaan pembangunan. RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Bekasi Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH YANG TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD KOTA	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Sosialisasi RTRW	RTRW belum dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh.	Anggaran terbatas dan mekanisme sosialisasi yang belum efektif.	Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang.
2	Pelayanan Data dan Informasi Peta	Belum optimalnya pelayanan data dan informasi peta.	Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan rencana tata ruang, khususnya dalam penyusunan rencana rinci tata ruang.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3	Pengendalian Tata Ruang	Kinerja BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) dalam penataan ruang belum optimal.	Koordinasi belum dilaksanakan secara optimal baik dalam proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.	- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 tahun 2004 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
4	Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Belum efektifnya peran BKPRD dalam pengendalian pemanfaatan ruang.	Belum adanya pedoman pengawasan penyelenggaraan penataan ruang.	Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD atau hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra periode tahun sebelumnya. Berikut adalah isu-isu strategis terkait perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi.

#### **1. Kualitas perencanaan pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan mengenai tingkat partisipatif, responsif, menyeluruh, selaras, dan terukur**

Isu kualitas perencanaan pembangunan daerah ini sesuai dengan tugas pokok Bappeda Kota Bekasi di bidang perencanaan pembangunan daerah dan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan di Bappeda Kota Bekasi, antara lain: (1) belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi; serta (2) belum optimalnya pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi. Kedua permasalahan tersebut sangat mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan. Oleh karena itu, kualitas perencanaan pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan, melalui penyelesaian permasalahan tersebut agar menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, responsif, menyeluruh, selaras dan terukur.

#### **2. Kualitas dan analisis data perencanaan yang belum optimal**

Isu kualitas dan analisis data perencanaan di Bappeda Kota Bekasi masih menjadi perhatian karena masih ditemui beberapa permasalahan, antara lain: (1) masih belum tersedianya data perencanaan yang lengkap, terbaru dan terintegrasi dalam satu sistem pengolahan data perencanaan pembangunan; (2) masih rendahnya kualitas data yang tersedia; serta (3) masih belum optimalnya pemanfaatan data atau analisis data perencanaan. Oleh karena itu, kualitas data dan pemanfaatan atau analisisnya perlu terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

**3. Kualitas sumberdaya aparatur perencanaan daerah yang masih perlu ditingkatkan**

Kualitas sumberdaya aparatur perencanaan memiliki peran penting dalam menghasilkan rencana pembangunan daerah Kota Bekasi yang berkualitas. Namun, aparatur perencana khususnya di Bappeda Kota Bekasi yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel, masih terbatas. Oleh karena itu, kualitas aparatur perencanaan di Bappeda Kota Bekasi perlu terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitasnya.

**4. Laporan keuangan dan laporan akuntabilitas masih perlu ditingkatkan mutu dan kinerjanya**

Laporan keuangan dan laporan akuntabilitas harus selalu menjadi perhatian seluruh SKPD, khususnya Bappeda Kota Bekasi karena sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PermenPAN-RB RI) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam PermenPAN-RB tersebut diamanatkan bahwa seluruh instansi pemerintah harus menyusun laporan kinerja tahunan yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Adapun tujuan dari pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, kualitas dari laporan kinerja, termasuk laporan keuangan perlu terus ditingkatkan dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Visi dan Misi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah, menempati kedudukan penting dan strategis dalam kaitannya dengan proses pembangunan daerah. Hal tersebut menuntut setiap aparatur perencana berkemampuan untuk melaksanakan perannya sebagai *agent of development* yang kreatif, inovatif, partisipatif dan dinamis dalam mewujudkan amanat tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bekasi, yaitu **“Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”**.

Kemampuan Bappeda Kota Bekasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian Visi dan Misi tersebut. Produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda Kota Bekasi harus mampu menjawab masalah dan tantangan Kota Bekasi tahun 2013-2018 dalam mewujudkan Visi dan Misi serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Selain itu, Bappeda Kota Bekasi juga harus mampu untuk membangkitkan prakarsa serta peran aktif masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan peluang yang ada di daerah guna mengoptimalkan pembangunan dan menangkap peluang yang ada bagi daerahnya serta menghayati kebutuhan yang dihadapi masyarakat Kota Bekasi.

Untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi, dalam RPJMD Tahun 2013-2018 telah ditetapkan kebijakan, program dan sasaran serta target kinerja yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh SKPD. Misi, tujuan misi, sasaran misi, indikator sasaran misi, kebijakan, dan program yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh Bappeda Kota Bekasi selama kurun waktu 2013-2018 dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Uraian Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Kebijakan, dan Program terkait Bappeda Kota Bekasi dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan

I	<b>MISI 1</b>	Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
II	<b>TUJUAN</b>	Pencapaian kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik yang prima.
III	<b>SASARAN</b>	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan.
IV	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	Kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap dokumen rencana pembangunan.
V	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	Integrasi perencanaan pembangunan dengan menerapkan prinsip SMART ( <i>specific, measurable, attainable, realistic, time bound</i> ) dan visioner yang didukung pengendalian dan evaluasi yang optimal.
VI	<b>PROGRAM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</li> <li>3. Program Perencanaan Sosial Budaya</li> <li>4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</li> <li>5. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</li> <li>6. Program Pengembangan Data dan Informasi</li> </ol>

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018, Bappeda Kota Bekasi perlu menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang sesuai dengan kewenangannya atau tugas pokok dan fungsinya.

Visi Bappeda Kota Bekasi merupakan pandangan ke depan Bappeda Kota Bekasi dalam menghadapi tantangan masa depan, yang memuat cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan sehingga dapat berkarya secara konsisten, inovatif, kreatif dan produktif serta partisipatif dalam mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Kota Bekasi, **“Bekasi Maju, Sejahtera, dan Ihsan”**. Visi Bappeda Kota Bekasi untuk periode tahun 2013-2018 adalah **“Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional, Andal dan Kredibel Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”**.



Proses perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan para pelaksana pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Profesional, Andal dan Kredibel adalah sebagai berikut:

- PROFESIONAL** : Mampu menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang didasari dengan keahlian dan menjunjung tinggi moralitas agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat.
- ANDAL** : Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.
- KREDIBEL** : Menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yang meliputi transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Berdasarkan Visi di atas, untuk mencapai tujuan dan mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Kota Bekasi, maka ditetapkan misi. Adapun Misi Bappeda Kota Bekasi untuk periode tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Responsif, Menyeluruh, Selaras, Terukur dan Berkesinambungan;
2. Terwujudnya kinerja organisasi yang akuntabel dalam mencapai tujuan.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Berikut tujuan dan sasaran, serta indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan (ukuran keberhasilan, target, dan program:

**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018**

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Program
					2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Misi Kesatu :</b> Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Responsif, Menyeluruh, Selaras, Terukur dan Berkesinambungan	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, responsif dan selaras	1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	Persen (%)	-	-	20%	25%	30%	1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
		2 Meningkatkan responsivitas terhadap permasalahan pembangunan yang tercakup dalam dokumen perencanaan	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas pencapaian sasaran tingkat kota yang ditindaklanjuti dalam dokumen rencana pembangunan daerah	Persen (%)	-	-	85%	90%	95%	2 Program Pengembangan Data dan Informasi
		3 Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	1 Persentase kesesuaian Program RKPD terhadap RPJMD	Persen (%)	95%	95%	100%	100%	100%	3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
			2 Persentase kesesuaian Program APBD terhadap RKPD	Persen (%)	95%	95%	100%	100%	100%	

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Program
					2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			3 Persentase kesesuaian Program RENSTRA terhadap RPJMD	Persen (%)	-	-	-	-	100%	1 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
			4 Persentase kesesuaian Program RENJA terhadap RKPD	Persen (%)	95%	95%	100%	100%	100%	2 Program Perencanaan Sosial Budaya 3 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
<b>Misi Kedua :</b> Terwujudnya kinerja organisasi yang akuntabel dalam mencapai tujuan	Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	-	-	-	80	80.25	1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
			2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	A	A	A	A	A	2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			3 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR SASARAN (4)	SATUAN (5)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Program (11)
					2014 (6)	2015 (7)	2016 (8)	2017 (9)	2018 (10)	
										4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

#### 4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam mencapai Visi dan Misi Bappeda Kota Bekasi, perlu disusun strategi dan kebijakan. Strategi adalah cara atau langkah-langkah yang berisi rangkaian kebijakan yang bersifat makro untuk mewujudkan visi dan misi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki (Permendagri Nomor 54 tahun 2010).

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Mengacu kepada strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan, untuk mencapai visi dan misi Walikota Bekasi dan organisasi, Bappeda Kota Bekasi menetapkan kebijakan dan strategi yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.3**

**Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018**

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
<b>MISI I : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Responsif, Menyeluruh, Selaras, Terukur dan Berkesinambungan</b>			
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang responsif, partisipatif dan selaras	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah	1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
			2. Pelibatan masyarakat dalam musrenbang
	2. Meningkatnya responsivitas terhadap permasalahan pembangunan yang tercakup dalam dokumen perencanaan	Peningkatan responsivitas terhadap permasalahan pembangunan yang tercakup dalam dokumen perencanaan	1. Sosialisasi dan evaluasi kinerja pembangunan
			2. Pemanfaatan teknologi informasi seperti <i>e-monev</i>
	3. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJP, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja)	1. Pemanfaatan teknologi informasi seperti <i>e-planning</i>
			2. Penyusunan kebijakan tentang perencanaan dan penganggaran
		Peningkatan dan	3. Peningkatan kapasitas SDM
			Peningkatan ketersediaan data

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
		pengembangan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan	secara lengkap, terbaru, dan terintegrasi
<b>MISI II : Terwujudnya Kinerja Organisasi yang Akuntabel dalam Mencapai Tujuan</b>			
Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan atau pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah	1. Pelaksanaan <i>capacity building</i> , pelatihan/bimbingan teknis, dan penataan kelembagaan, terkait pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah
			2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Publik terkait pelayanan yang diberikan oleh Bappeda kepada Perangkat Daerah
			3. Penerapan SAKIP sesuai PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kota Bekasi menitikberatkan pada profesionalisme dalam menyusun perencanaan pembangunan yang menyeluruh, selaras, implementatif dan berkelanjutan berbasis masyarakat. Hal tersebut selaras dengan visi dan misi yang akan dicapai Bappeda Kota Bekasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Visi dan misi Bappeda Kota Bekasi diimplementasikan melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam lima tahun ke depan harus dapat mewujudkan sasaran yang telah dituangkan di dalam Renstra Bappeda Kota Bekasi tahun 2013-2018. Program-program yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bekasi tahun 2013-2018 adalah:

1. Program Perencanaan Pembangunan;
2. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
5. Program Pengembangan Data dan Informasi;
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;  
dan
11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Sementara kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bekasi dalam kurun waktu 2013–2018 diuraikan dalam Tabel 5.1 berikut ini:

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

**Tabel 5.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Perubahan III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Bekasi	-	-	3,354,941,000	-	3,860,000,000	-	4,197,385,000	30%	5,000,000,000	100%	8,150,000,000
	2 Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Bekasi	-	100%		100%		100%		100%		100%	
	3 Persentase kesesuaian Program RPJMD dengan RKPD	74	81%		95%		95%		95%		100%	
	4 Persentase kesesuaian Program RKPD dengan APBD	-	95%		95%		100%		100%		100%	
	5 Persentase kesediaan data monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan	-	100%		100%		100%		100%		100%	



**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1 Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan	- Jumlah laporan kinerja pembangunan dan aplikasi <i>e-monev</i>	Laporan Kinerja Pembangunan Tahun 2012	4 laporan (1 laporan kinerja pembangunan SKPD, 1 laporan pelaksanaan pemantauan kegiatan pembangunan daerah TA 2014, 1 laporan evaluasi RKPD TA 2013, 1 laporan hasil rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan TA 2014) dan 1 aplikasi <i>e-Monev</i>	650,000,000	4 laporan (1 laporan kinerja pembangunan SKPD, 1 laporan pelaksanaan pemantauan kegiatan pembangunan daerah TA 2015, 1 laporan evaluasi RKPD TA 2014, 1 laporan hasil rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan TA 2015) dan 1 aplikasi <i>e-Monev</i>	790,000,000	4 laporan (1 laporan kinerja pembangunan SKPD, 1 laporan pelaksanaan pemantauan kegiatan pembangunan daerah TA 2016, 1 laporan evaluasi RKPD TA 2015, 1 laporan hasil rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan TA 2016) dan 1 aplikasi <i>e-Monev</i>	700,000,000	1 aplikasi <i>E-Monev</i> ; 4 laporan Kinerja Pembangunan (Triwulanan); 4 Laporan Evaluasi RKPD (Triwulanan); 1 Laporan Pemantauan Pembangunan	750,000,000	10 laporan (1 laporan tahunan dan 4 laporan triwulanan kinerja pembangunan SKPD; 1 laporan akhir dan 4 laporan triwulanan evaluasi RKPD TA 2016);	1,100,000,000
2 Penyusunan RKPD	- Jumlah dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD)	Dokumen RKPD Tahun 2014	1 dokumen RKPD Tahun 2015	450,000,000	1 dokumen RKPD Tahun 2016 dan 1 dokumen RKPD Perubahan Tahun 2015	550,000,000	2 dokumen (1 dokumen RKPD Tahun 2017 dan 1 dokumen RKPD Perubahan Tahun 2016)	625,000,000	2 dokumen (1 dokumen RKPD Tahun 2018 dan 1 dokumen RKPD Perubahan Tahun 2017)	750,000,000	2 dokumen (1 dokumen RKPD Tahun 2019 dan 1 dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018)	750,000,000
3 Penyusunan dan Pembahasan KUA/KUPA - PPAS	- Jumlah dokumen KUA/KUPA - PPAS	KUA - PPAS Tahun 2014	2 dokumen KUA-PPAS Perubahan TA 2014 dan 2 dokumen KUA-PPAS TA 2015	804,941,000	2 dokumen KUA-PPAS Perubahan TA 2015 dan 2 dokumen KUA-PPAS TA 2016	600,000,000	2 dokumen (1 dokumen KUA - PPAS Perubahan TA. 2016 dan 1 dokumen KUA - PPAS TA. 2017)	750,000,000	2 dokumen (1 dokumen KUA - PPAS Perubahan TA. 2016 dan 1 dokumen KUA - PPAS TA. 2018)	750,000,000	2 dokumen (1 dokumen KUA - PPAS Perubahan TA. 2016 dan 1 dokumen KUA - PPAS TA. 2019)	750,000,000
4 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	- Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan, kecamatan, forum SKPD, dan musrenbang Kota	-	4 dokumen hasil musrenbang (kelurahan, kecamatan, forum SKPD, musrenbang kota)	700,000,000	4 laporan hasil musrenbang (kelurahan, kecamatan, forum SKPD, musrenbang kota)	670,000,000	4 dokumen hasil musrenbang (kelurahan, kecamatan, forum SKPD, musrenbang kota)	947,385,000	4 dokumen hasil musrenbang (kelurahan, kecamatan, forum SKPD, musrenbang kota)	900,000,000	4 dokumen hasil musrenbang (kelurahan, kecamatan, forum SKPD, musrenbang kota)	900,000,000

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
5 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem e-Planning dalam Perencanaan Pembangunan	- Jumlah aplikasi e-planning	-	1 aplikasi e-planning	300,000,000	1 aplikasi e-planning	400,000,000	1 aplikasi e-planning dan 2 kali pembekalan admin	400,000,000	1 Aplikasi E-Planning 2 kali Pembekalan (TA. 2018 dan TA. 2017 Perubahan; 1 Aplikasi E-Budgeting; 1 Kali Sosialisasi	750,000,000	1 aplikasi e-planning dan 2 kali pembekalan admin	750,000,000
6 Penyusunan Perjanjian Kinerja	- Jumlah dokumen perjanjian kinerja SKPD dan Kota Bekasi	1 Dokumen TAPKIN Kota dan 53 Buah Dokumen TAPKIN SKPD Tahun 2013	53 dokumen penetapan kinerja SKPD dan 1 dokumen penetaan kinerja Kota Bekasi	150,000,000	1 dokumen evaluasi penetapan kinerja TA 2014, 1 dokumen perjanjian kinerja SKPD dan Kota Bekasi TA 2015, dan 1 dokumen perjanjian kinerja perubahan TA 2015	200,000,000	1 dokumen evaluasi penetapan kinerja TA 2015, 1 dokumen perjanjian kinerja SKPD dan Kota Bekasi TA 2016, dan 1 dokumen perjanjian kinerja perubahan TA 2016	200,000,000	3 dokumen (1 dokumen evaluasi penetapan kinerja TA 2016, 1 dokumen perjanjian kinerja SKPD dan Kota Bekasi TA 2017, dan 1 dokumen perjanjian kinerja perubahan TA 2017)	250,000,000	3 dokumen (1 dokumen evaluasi penetapan kinerja TA 2017, 1 dokumen perjanjian kinerja SKPD dan Kota Bekasi TA 2018, dan 1 dokumen perjanjian kinerja perubahan TA 2018)	250,000,000
7 Pelaporan Dana Non APBD	- Jumlah laporan dana non APBD	laporan DAK, laporan tugas pembantuan, laporan bantuan provinsi, laporan DBHCHT, dan laporan bantuan DKI	1 laporan DAK, 1 laporan tugas pembantuan, dan 1 laporan DBHCHT	-	1 laporan DAK, 1 laporan tugas pembantuan, dan 1 laporan DBHCHT	-	5 laporan (1 laporan DAK, 1 laporan tugas pembantuan, 1 laporan bantuan provinsi, 1 laporan DBHCHT, dan 1 laporan bantuan DKI)	225,000,000	1 laporan dana non APBD	250,000,000	-	-
8 Pelaporan Dana Non Pendapatan Asli Dana Daerah (PAD)	Jumlah laporan Dana Non Pendapatan Asli Dana Daerah (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala	Jumlah Dokumen LKPJ	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen LKPJ Tahun 2016	600,000,000	1 dokumen LKPJ Tahun 2017	600,000,000

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Daerah												
10 Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi	- Jumlah dokumen evaluasi RPJMD	-	-	-	-	-	1 dokumen evaluasi RPJMD Kota Bekasi	350,000,000	-	-	-	-
11 Penyusunan RPJMD	- Jumlah dokumen perencanaan menengah (RPJMD)	Dokumen RPJMD Tahun 2013 - 2018	-	-	1 dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 Perubahan	-	-	-	-	-	1 dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 Perubahan dan 1 dokumen RPJMD Tahun 2018 - 2023	2,000,000,000
12 Evaluasi dan Review RPJMD Kota Bekasi	Jumlah dokumen review RPJMD	-	-	-	1 dokumen review RPJMD Kota Bekasi	650,000,000	-	-	-	-	-	-
13 Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)	- Jumlah SOP Bappeda	-	10 SOP	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Penyusunan Peraturan Walikota tentang e-planning	- Jumlah peraturan walikota tentang pengelolaan aplikasi e-planning	-	1 peraturan walikota tentang e-planning	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Penyelenggaraan Dewan Kota Cerdas Kota Bekasi dan C-Gen	Jumlah laporan Penyelenggaraan Dewan Kota Cerdas Kota Bekasi dan C-Gen										1 Laporan Penyelenggaraan Dewan Kota Cerdas Bekasi	900,000,000

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
16 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kota Bekasi berbasis kecamatan										10 laporan (laporan triwulanan dan tahunan)	150,000,000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 Persentase penyelesaian perencanaan pembangunan jangka menengah sektor ekonomi Kota Bekasi		-	1,675,000,000	-	730,000,000	-	1,350,000,000	-	1,050,000,000	100%	2,000,000,000
	2 Persentase penyelesaian perencanaan pembangunan tahunan sektor ekonomi Kota Bekasi	-	100%		100%		100%		100%		100%	
	3 Persentase kesesuaian perencanaan tahunan sektor ekonomi dengan RKPD	-	100%		100%		100%		100%		100%	
1 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	- Jumlah dokumen sinergitas pembangunan daerah bidang ekonomi	80.95%	1 dokumen sinergitas perencanaan pembangunan ekonomi Kota Bekasi	350,000,000	1 dokumen sinergitas perencanaan pembangunan ekonomi Kota Bekasi dan 6 berita acara kesepakatan hasil	430,000,000	3 Dokumen (1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2017, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD tahun	500,000,000	3 Dokumen (1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2018, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD	400,000,000	-	-

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
					desk RKPD Tahun 2016		2016, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Ekonomi Tahun 2015)		Tahun 2017, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Tahun 2016)			
2	Pembinaan dan Pemantauan Sentra Oleh-oleh Khas Bekasi	- Jumlah sentra oleh-oleh khas Bekasi yang dibina dan dipantau	-	-	-	-	1 sentra oleh-oleh khas Bekasi	150,000,000	-	-	-	-
3	Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi	- Jumlah buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi	1 buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2013	250,000,000	1 buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2014	300,000,000	1 buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2015	350,000,000	1 buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi Tahun 2016 (hardcopy dan e-book)	300,000,000	-	-
		2 Jumlah peserta sosialisasi hasil analisis indikator ekonomi makro Kota Bekasi					50 orang				-	-
4	Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Tahun 2018-2023	Jumlah dokumen kajian perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam tahun 2018-2023	-	-	-	-			1 dokumen kajian perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam tahun 2018-2023	350,000,000		
5	Penyusunan Indeks Gini Ratio dan	1 Jumlah Buku Indeks Gini Ratio	-	250,000,000	-	-	1 buku Indeks Gini Ratio	350,000,000	-	-	-	-

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Distribusi Pendapatan Ekonomi Kota Bekasi Berdasarkan Analisis Study Williamson	2 Jumlah peserta sosialisasi hasil penyusunan buku Indeks Gini Ratio						50 orang					
6 Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	- Jumlah dokumen masterplan pembangunan ekonomi daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Penyusunan RAPERDA Institusi Pengelola Dana Bergulir Kota Bekasi	- Jumlah Raperda BLUD Pengelola Dana Bergulir Kota Bekasi	-	1 dokumen Raperda BLUD Pengelola Dana Bergulir Kota Bekasi	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Pemeliharaan Data Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Perkonomian Kota Bekasi	- Jumlah sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan ekonomi Kota Bekasi	-	1 sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan ekonomi Kota Bekasi	75,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Fasilitasi Pembentukan Forum Bekasi Kreatif	- Jumlah peserta sarasehan pembentukan Forum Bekasi Kreatif, jumlah peserta sosialisasi menuju Forum Bekasi Kreatif, jumlah peserta seminar dan	-	175 orang peserta sarasehan pembentukan Forum Bekasi Kreatif, 175 orang peserta sosialisasi menuju Forum Bekasi Kreatif, 30 orang peserta seminar dan	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
	kunjungan lapangan FKB, jumlah peserta kunjungan kerja		kunjungan lapangan FKB, 27 orang peserta kunjungan kerja									
10 Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bekasi	500,000,000
11 Kajian Pengembangan BUMD	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan BUMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen Kajian Pengembangan BUMD	400,000,000
12 Kajian Pengembangan Pertanian Perkotaan	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Pertanian Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen Kajian Pengembangan Pertanian Perkotaan	500,000,000
13 Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen Hasil Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2019 lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	300,000,000

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
14 Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2018-2023 lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2018-2023 lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen Hasil Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2018-2023 lingkup Bidang Ekonomi dan SDA	300,000,000
Program Perencanaan Sosial Budaya	1 Persentase penyelesaian perencanaan pembangunan jangka menengah sektor sosial budaya Kota Bekasi	-	-	2,400,000,000	-	1,850,000,000	-	2,105,000,000	-	2,500,000,000	100%	1,950,000,000
	2 Persentase penyelesaian perencanaan pembangunan tahunan sektor sosial budaya Kota Bekasi	-	100%		100%		100%		100%		100%	
	3 Persentase kesesuaian perencanaan tahunan sektor sosial budaya dengan RKPD	-	100%		100%		100%		100%		100%	



**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	- Jumlah dokumen laporan sinergitas perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya	80.95%	1 dokumen laporan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya dan 32 dokumen Rencana Kerja SKPD	450,000,000	1 dokumen laporan kegiatan sinergitas perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya dan 28 dokumen Rencana Kerja SKPD	600,000,000	3 Dokumen (1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya Tahun 2017, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD Tahun 2016, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya Tahun 2015)	550,000,000	1 dokumen laporan (3 buku)	400,000,000	-	-
2 Penyusunan Indikator Makro Bidang Sosial Budaya	- Jumlah dokumen indikator makro bidang sosial budaya	-	-	-	-	-	1 dokumen indikator makro bidang sosial budaya	350,000,000	1 dokumen indikator makro bidang sosial budaya	400,000,000	-	-
3 Evaluasi Program Sekolah Percontohan	- Jumlah sekolah pecontohan binaan Bappeda	-	-	-	-	-	1 sekolah dasar percontohan binaan Bappeda	275,000,000	1 Laporan Evaluasi Program Sekolah Percontohan	100,000,000	-	-
4 Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Tahun 2018-2023	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Tahun 2018-2023	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen Rencana Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Tahun 2018-2023	350,000,000	-	-
5 Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Percepatan	- Jumlah dokumen laporan pemantauan dan evaluasi	-	2 dokumen laporan pemantauan dan evaluasi RAD MDG's	200,000,000	2 dokumen laporan pemantauan dan evaluasi RAD MDG's	300,000,000	-	-	-	-	-	-

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Pencapaian <i>Millenium Development Goals</i> (MDGs) dan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	RAD MDG's dan SDGs											
6 Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Pencapaian IPM Kota Bekasi	- Jumlah laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM	Laporan Pengendalian dan Monitoring Program Pendukung Pencapaian IPM Tahun 2012	1 laporan evaluasi diri IPM, 1 dokumen implementasi IPM, dan 1 dokumen laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM	200,000,000	1 laporan evaluasi diri IPM, 1 dokumen implementasi IPM, dan 1 dokumen laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM	250,000,000	1 laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM Kota Bekasi	280,000,000	1 laporan pengendalian dan monitoring program pendukung pencapaian IPM Kota Bekasi	200,000,000	-	-
7 Penyelenggaraan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Bekasi	- Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Bekasi, dan dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi	Laporan LP2KD Tahun 2012 dan Dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi	1 jenis laporan monitoring, 1 dokumen LP2KD, dan 1 dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi	300,000,000	2 dokumen (1 dokumen LP2KD dan 1 dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi)	500,000,000	2 dokumen (1 dokumen LP2KD dan 1 dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi)	400,000,000	2 dokumen (1 dokumen LP2KD dan 1 dokumen RAD Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi)	200,000,000	-	-
8 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG)	- Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
9 Penyusunan Strategi Pembangunan Partisipasi Berbasis Masyarakat	- Jumlah dokumen strategi pembangunan partisipasi berbasis masyarakat	-	-	-	-	-	1 dokumen strategi pembangunan partisipasi berbasis masyarakat	250,000,000	-	-	-	-
10 Optimalisasi Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Pembangunan	- Jumlah raperwal tentang tugas, pokok dan fungsi kecamatan dan dokumen hasil kajian teknis penguatan peran dan fungsi kecamatan dalam pembangunan	-	-	-	1 raperwal tentang tugas, pokok dan fungsi kecamatan dan 1 dokumen hasil kajian teknis penguatan peran dan fungsi kecamatan dalam pembangunan	200,000,000	-	-	-	-	-	-
11 Penyusunan Masterplan Pembangunan Kesehatan Kota Bekasi	- Jumlah dokumen Masterplan Pembangunan Bidang Kesehatan Kota Bekasi	-	1 dokumen Masterplan Pembangunan Bidang Kesehatan Kota Bekasi	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Feasibility Study (FS) Perguruan Tinggi Negeri (UNB) Kota Bekasi	- Jumlah dokumen Feasibility Study (Kelayakan) Pendirian Perguruan Tinggi (UNB)	-	1 dokumen Feasibility Study (Kelayakan) Pendirian Perguruan Tinggi (UNB)	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Penyusunan Metode Penghitungan Partisipasi	- Jumlah dokumen metode penghitungan partisipasi	-	1 dokumen metode penghitungan partisipasi	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Masyarakat dalam Pembangunan	partisipasi masyarakat dalam pembangunan		masyarakat dalam pembangunan									
14 Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten/Kota (Banprov)	Jumlah laporan Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten/Kota (Banprov)		-	-	-	-	-	-	1 laporan	100,000,000	-	-
15 Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG) (Banprov)	Jumlah laporan Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG) (Banprov)		-	-	-	-	-	-	1 laporan	750,000,000	-	-
16 Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2019 lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen Hasil Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2019 lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	500,000,000

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( <i>OUTCOME</i> ) DAN KEGIATAN ( <i>OUTPUT</i> )	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
17 Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2018-2023 lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2018-2023 lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen Hasil Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2018-2023 lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	400,000,000
18 Penyusunan Strategi Pencapaian IPM Kota Bekasi	Jumlah Strategi Pencapaian IPM Kota Bekasi		-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen Strategi Pencapaian IPM Kota Bekasi	400,000,000
19 Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bekasi	Jumlah dokumen SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), RAD (Rencana Aksi Daerah), dan LP2KD (Laporan Pelaksanaan Program Penanggulang		-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen LP2KD	500,000,000

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
	an Kemiskinan daerah) Kota Bekasi											
20 Pro-Poor Planning Budgeting and Monitoring (P3BM)	Jumlah laporan hasil pengolahan data pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Bekasi		-	-	-	-	-	-	-	-	10 laporan (laporan triwulanan dan tahunan)	150,000,000
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1 Persentase penyelesaian perencanaan pembangunan jangka menengah sektor prasarana wilayah dan SDA Kota Bekasi	-	-	2,750,000,000	-	3,785,000,000	-	4,650,000,000	-	3,500,000,000	100%	1,900,000,000
	2 Persentase penyelesaian perencanaan pembangunan tahunan sektor prasarana wilayah dan SDA Kota Bekasi	-	100%		100%		100%		100%		100%	

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
	<b>3 Persentase kesesuaian perencanaan tahunan sektor prasarana daerah dan SDA dengan RKPD</b>	-	100%		100%		100%		100%		100%	
1 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	- Jumlah dokumen sinergitas pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	3 Dokumen (1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Fisik Tahun 2015, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD Tahun 2014, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Fisik Tahun 2013)	350,000,000	3 Dokumen (1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Fisik Tahun 2016, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD Tahun 2015, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Fisik Tahun 2014)	600,000,000	3 Dokumen (1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Bidang Fisik Tahun 2017, 1 Berita Acara Hasil Desk Renja SKPD Tahun 2016, dan 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Fisik Tahun 2015)	550,000,000	3 dokumen laporan (5 buku)	400,000,000	-	-
2 Verifikasi Permohonan Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi	- Jumlah laporan perencanaan penataan ruang, rekapitulasi rekomendasi pemanfaatan ruang dan izin prinsip pemanfaatan ruang	-	-	-	1 laporan perencanaan penataan ruang, rekapitulasi rekomendasi pemanfaatan ruang dan izin prinsip pemanfaatan ruang	400,000,000	1 laporan perencanaan penataan ruang, rekapitulasi rekomendasi pemanfaatan ruang dan izin prinsip pemanfaatan ruang	400,000,000	-	-	-	-
3 Study Kebutuhan Perumahan Vertikal di Kota Bekasi	- Jumlah dokumen study kebutuhan perumahan vertikal di Kota Bekasi dan	-	-	-	-	-	1 dokumen hasil study kebutuhan perumahan vertikal di Kota Bekasi	500,000,000	-	-	-	-

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
	jumlah peraturan walikota											
4 Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bekasi	- Jumlah dokumen rencana pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman Kota Bekasi dan jumlah peraturan walikota	-	-	-	-	-	1 dokumen rencana pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman Kota Bekasi	600,000,000	-	-	-	-
5 Pelaksanaan Rencana Tindak Penataan Transportasi Publik	- Jumlah dokumen rencana tindak penataan transportasi publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Penunjang Program P2KH (Kota Hijau)	- Jumlah dokumen Ruang Terbuka Hijau Kota Bekasi	-	-	-	-	-	1 dokumen Ruang Terbuka Hijau Kota Bekasi	250,000,000	1 Forum Kota Hijau dan 2 atribut Masterplan Hijau Kota Bekasi	250,000,000	-	-
7 Masterplan Drainase Kota Bekasi	- Jumlah masterplan dan Raperwal Drainase Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	1 Masterplan dan 1 Raperwal	500,000,000		
8 Penyusunan Masterplan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	- Jumlah dokumen Masterplan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen Masterplan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	500,000,000	-	-
9 Pelaksanaan Rencana Tindak Penataan	- Jumlah dokumen Rencana Tindak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)											
10 Penyusunan Masterplan Pemadam Kebakaran	- Jumlah dokumen Masterplan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	1 dokumen Masterplan Pemadam Kebakaran	500,000,000	-	-	-	-
11 Perencanaan Penataan Ruang untuk Tanggap Darurat Bencana Kebakaran	- Jumlah dokumen perencanaan penataan ruang untuk tanggap darurat bencana kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Perencanaan Infrastruktur Sektor Persampahan	- Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur sektor persampahan	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen perencanaan infrastruktur sektor persampahan	500,000,000	-	-
13 Studi Perencanaan Sistem Integrasi Antar Moda Angkutan di Kota Bekasi	- Jumlah dokumen perencanaan sistem integrasi antar moda angkutan di Kota Bekasi	-	-	-	-	-	1 dokumen perencanaan sistem integrasi antar moda angkutan di Kota Bekasi	500,000,000	-	-	-	-
14 Study Dampak Pembangunan Tol Becakayu terhadap Infrastruktur Kota Bekasi	- Jumlah dokumen study dampak pembangunan tol Becakayu terhadap infrastruktur Kota Bekasi	-	-	-	-	-	1 dokumen hasil studi dampak pembangunan tol Becakayu terhadap infrastruktur Kota Bekasi	500,000,000	-	-	-	-

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
15 Masterplan Penerangan Jalan Umum	- Jumlah dokumen Masterplan Penerangan Jalan Umum (PJU)	-	-	-	1 dokumen Masterplan Penerangan Jalan Umum (PJU)	500,000,000	-	-	-	-	-	-
16 Penyusunan Rencana Tindak Penataan Penerangan Jalan Umum	- Jumlah dokumen Rencana Tindak Penataan Penerangan Jalan Umum (PJU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 Masterplan Pengembangan Jalan dan Jembatan	- Jumlah dokumen Masterplan Pengembangan Jalan dan Jembatan	-	-	-	1 dokumen Masterplan Pengembangan Jalan dan Jembatan	500,000,000	-	-	-	-	-	-
18 Penataan Pulau Jalan	- Jumlah lokasi pulau jalan	-	-	-	-	-	1 lokasi penataan pulau jalan	250,000,000	-	-	-	-
19 Penyusunan Naskah Akademis dan Raperwal Rencana Induk Transportasi	- Jumlah Naskah Akademis dan Raperwal Rencana Induk Transportasi	-	-	-	1 naskah akademis dan rancangan peraturan walikota Rencana Induk Transportasi	200,000,000	-	-	-	-	-	-
20 Penyelenggaraan dan Penunjang Kinerja BKPRD Kota Bekasi	- Jumlah dokumen evaluasi pengendalian pemanfaatan ruang Kota Bekasi	-	1 dokumen rekomendasi pemanfaatan ruang	400,000,000	-	-	-	-	1 dokumen	400,000,000	1 Dokumen Laporan Perencanaan Penataan Ruang dan Rekapitulasi Rekomendasi dan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang	400,000,000

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
	Persentase permohonan pemanfaatan ruang								100%		100%	
21 Review RPIJM Kota Bekasi 2014-2019	- Jumlah dokumen rencana program investasi jangka menengah Kota Bekasi 2014-2019	-	1 dokumen rencana program investasi jangka menengah Kota Bekasi 2014-2019	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Penyusunan RPKPP Kawasan Penanganan	- Jumlah dokumen RPKPP Kawasan Penanganan III dan jumlah dokumen DED di Kawasan Penanganan I	-	1 dokumen RPKPP Kawasan Penanganan III dan 1 dokumen DED di Kawasan Penanganan I	800,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)	- Jumlah dokumen RPKPP Kawasan Penanganan V,VI,VII	-	-	-	1 dokumen dokumen RPKPP Kawasan Penanganan V,VI,VII	600,000,000	-	-	-	-	-	-
24 Penamping Sarana dan Prasarana Sanimas	Jumlah dokumen rencana proses pelaksanaan sanitasi berbasis masyarakat	-	1 dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM)	350,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Penyusunan Review Dokumen Memorandum	- Jumlah buku review memorandum program sektor	-	1 buku review memorandum program sektor sanitasi	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Program Sektor Sanitasi (MPSS) Kota Bekasi	sanitasi											
26 Review dan Evaluasi Program Sanitasi di Kota Bekasi	- Jumlah dokumen strategi sanitasi dan survey EHRA	-	-	-	1 dokumen strategi sanitasi dan survey EHRA	600,000,000	-	-	-	-	-	-
27 Pembinaan dan Pemberdayaan Komunitas Hijau Kota Bekasi dalam P2KH	- Jumlah dokumen pembinaan dan pemberdayaan komunitas hijau Kota Bekasi dalam P2KH	-	1 dokumen pembinaan dan pemberdayaan komunitas hijau Kota Bekasi dalam P2KH	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Penyelenggaraan Program Pengembangan Kota Hijau	- Jumlah dokumen Ruang Terbuka Hijau Kota Bekasi	-	-	-	1 dokumen Ruang Terbuka Hijau Kota Bekasi	250,000,000	-	-	-	-	-	-
30 Penyusunan DED Penataan Gedung Bappeda Mengacu pada Konsep Green Building	Jumlah DED penataan gedung Bappeda mengacu pada konsep Green Building	-	-	-	1 dokumen	135,000,000	-	-	-	-	-	-
31 Penyusunan Rencana Induk Transportasi Kota Bekasi	- Jumlah Rencana Induk Transportasi Kota Bekasi Berdasarkan Manajemen Rekayasa Transportasi/La lulintas sesuai RTRW 2011-2031	-	1 Dokumen Rencana Induk Transportasi	600,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
32 Inventarisasi dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca di Kota Bekasi	- Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca di Kota Bekasi	-	1 dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca di Kota Bekasi	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Review RTRW Kota Bekasi Tahun 2011 - 2031	- Jumlah dokumen rekomendasi peninjauan kembali (PK), materi teknis, dan naskah akademis	Dokumen RTRW Kota Bekasi Tahun 2011 - 2031	-	-	-	-	1 dokumen rekomendasi PK	600,000,000	1 materi teknis PK	500,000,000	-	-
34 Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2018-2023	Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2018-2023		-	-	-	-	-	-	1 Dokumen Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Tahun 2018-2023	450,000,000	-	-
35 Rencana Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi di Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi di Kota Bekasi		-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen (hasil Review RPI2JM (Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), RISPAM (Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air	400,000,000

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
											Minum))	
36	Penyusunan Raperda RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031	Jumlah Naskah Akademis dan Raperda RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen (Naskah Akademis dan Raperda RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031)	500,000,000
37	Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen Hasil Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2019 lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah	300,000,000
38	Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2018-2023 lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2018-2023 lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen Hasil Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah Tahun 2018-2023	300,000,000
Program Pengembangan Data dan Informasi	1 Persentase jumlah data primer yang tersedia, tervalidasi, dan terbaru	-	-	1,325,000,000	-	2,610,000,000	70%	1,600,000,000	75%	2,075,000,000	80%	3,850,000,000

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
	<b>2 Persentase jumlah data sekunder yang tersedia, tervalidasi, dan terbaru</b>	-	-		-		40%		45%		50%	
1 Pengembangan dan Pemeliharaan Website Bappeda Kota Bekasi	- Jumlah website Bappeda Kota Bekasi yang terpelihara dan terbaru	-	1 website	125,000,000	1 website	100,000,000	1 website Bappeda Kota Bekasi	100,000,000	1 website Bappeda Kota Bekasi	75,000,000	1 website Bappeda Kota Bekasi	100,000,000
2 Penyusunan Profil Daerah Kota Bekasi	- Jumlah buku Profil Daerah Kota Bekasi	-	-	-	1 buku Profil Daerah Kota Bekasi dan 1 buku Pilah Gender	500,000,000	1 buku Profil Daerah Kota Bekasi	300,000,000	1 buku Profil Daerah Kota Bekasi	250,000,000	-	-
3 Pengelolaan Database Pembangunan	- Jumlah sistem pengelolaan database pembangunan yang valid dan update	-	1 database pembangunan	100,000,000	-	-	1 database pembangunan	200,000,000			-	-
4 Pengelolaan Data Aplikasi Data Spasial	Jumlah data spasial yang terbaru	-	1 aplikasi data spasial bidang pendidikan, 1 aplikasi data spasial kecamatan, kelurahan, puskesmas, puskesmas pembantu, 1 aplikasi data spasial bidang kemiskinan	350,000,000	1 aplikasi data spasial bidang pendidikan, 1 aplikasi data spasial kecamatan, kelurahan, puskesmas, puskesmas pembantu, 1 aplikasi data spasial bidang kemiskinan	250,000,000	5 data spasial	250,000,000	2 Data Spasial Tematik	900,000,000	-	-
5 Forum Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan	1 Jumlah forum sinergitas data dan informasi Kota Bekasi	-	1 kegiatan	150,000,000	1 kegiatan	700,000,000	1 forum sinergitas data dan informasi Kota Bekasi	750,000,000	1 forum sinergitas data dan informasi Kota Bekasi	600,000,000	-	
	2 Jumlah advertorial di	-	-		3 edisi majalah Mediasi Bappeda		2 advertorial di media cetak, 1		2 advertorial di media cetak, 1		-	

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
	media cetak dan elektronik, edisi majalah Mediasi Bappeda, dan stand pameran				dan advertorial di 2 media massa cetak		advertorial di media elektronik; 3 edisi majalah Mediasi Bappeda; dan 1 stand pameran		advertorial di media elektronik; 3 edisi majalah Mediasi Bappeda; dan 1 stand pameran			
6 Pengembangan Database Pembangunan	- Jumlah sistem pengelolaan database pembangunan yang valid dan update	-	-	-	1 aplikasi	100,000,000	-	-	1 database pembangunan 1 dokumen laporan kegiatan sistem pengembangan data base	250,000,000	-	-
7 Penyusunan Tabel Input Output Kota Bekasi Tahun 2014	- Jumlah buku Tabel Input Output Kota Bekasi Tahun 2014 dan jumlah peserta sosialisasi buku Tabel Input Output Kota Bekasi Tahun 2014	-	-	-	1 buku Tabel Input Output Kota Bekasi Tahun 2014 dan 50 orang peserta sosialisasi buku Tabel Input Output Kota Bekasi Tahun 2014	300,000,000	-	-	-	-	-	-
8 Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah	- Jumlah buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah dan jumlah peserta sosialisasi buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah	-	1 buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah dan 50 orang peserta sosialisasi buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah	250,000,000	1 buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah dan 50 orang peserta sosialisasi buku Analisis Indikator Ekonomi Makro Daerah	300,000,000	-	-	-	-	-	-



**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
9 Pembuatan Publikasi Dokumentasi Hasil Pembangunan Kota Bekasi	Jumlah publikasi dokumentasi hasil pembangunan Kota Bekasi	-	-	-	1 publikasi dokumentasi hasil pembangunan Kota Bekasi	360,000,000	-	-	-	-	-	-
10 Penyusunan Perhitungan PDRB Hijau dan Valuasi Ekonomi terhadap Degradasi Lingkungan Menurut Lapangan Usaha di Kota Bekasi	- Jumlah buku PDRB Hijau dan jumlah peserta pelatihan Perhitungan PDRB Hijau	-	1 buku PDRB Hijau dan 10 orang peserta Pelatihan Perhitungan PDRB Hijau	350,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Penyusunan Data Primer Kota Bekasi	- Jumlah buku Bekasi Dalam Angka	-	1 buku Bekasi Dalam Angka	250,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Penyempurnaan Data Base One Map One Data Tahap I	Jumlah Geodatabase		-	-	-	-	-	-			1 geodatabase	850,000,000
13 Analisa Data Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Analisa Data Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi		-	-	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen Analisa Data Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi (Analisis Indikator Ekonomi Makro, Analisis Indikator Makro Bidang Sosbud)	700,000,000
14 Penyempurnaan Database One Map One Data Tahap II	Jumlah Geodatabase		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Geodatabase	1,500,000,000

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
15 Persiapan dan Pengembangan Big Data	Jumlah Laporan Konsep Pengembangan Big Data		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan Konsep Pengembangan Big Data	700,000,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	- 1 advertorial di media cetak - 6 edisi majalah Bappeda/ per 2 bulan - e-book setiap dokumen perencanaan/kajian Bappeda - 2 stand pameran	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aparatur perencana yang memenuhi kebutuhan, tuntutan kompetensi jabatan dan peningkatan produktifitas	-	-	1,123,798,400	-	700,000,000	70%	-	80%	350,000,000	100%	450,000,000
1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana	- Jumlah aparatur perencana yang meningkat kemampuan teknisnya dan dalam penyusunan Renstra	-	-	-	106 orang aparatur perencana	700,000,000	-	-	100 orang aparatur perencanaan	350,000,000	-	-

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2 Penguatan Kapasitas Forum Sekretaris	- Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan teknisnya tentang manajemen strategis	-	60 orang aparatur	450,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Melalui Program Citynet	- Persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui program peningkatan kapasitas program Citynet	-	100%	173,798,400	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Capacity Building Aparatur Perencana	1 Jumlah aparatur perencana yang meningkat kemampuan teknisnya dalam membangun kepemimpinan	-	95 orang aparatur perencana	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Jumlah aparatur Bappeda yang meningkat kemampuan teknisnya dalam penatausahaan dan pertanggungja waban keuangan daerah		55 orang perencana Bappeda		-	-	-	-	-	-	-	-

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
5 Workshop Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi aparatur Bappeda	Jumlah aparatur yang memenuhi kebutuhan, tuntutan kompetensi jabatan dan peningkatan produktivitas		-		-		-		-		105 orang aparatur perencanaan	450,000,000
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	-	<b>100%</b>	<b>2,006,442,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,234,240,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,948,400,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,876,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>3,377,800,000</b>
1 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah peserta rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	38 orang	310,000,000	91 orang	300,000,000	38 orang	300,000,000	38 orang	300,000,000	38 orang	350,000,000
2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media cetak sebagai sarana informasi	-	5 jenis surat kabar (384 eksemplar dan 180 eksemplar)	35,000,000	5 jenis surat kabar (384 eksemplar dan 180 eksemplar)	55,000,000	5 jenis surat kabar	90,000,000	10 jenis surat kabar	130,000,000	10 jenis surat kabar	70,000,000
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	-	28 jenis	155,000,000	68 jenis	155,000,000	64 jenis	170,000,000	65 jenis	200,000,000	65 jenis	250,000,000
4 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah jasa tenaga administrasi perkantoran	-	24 orang TTK	646,042,000	25 orang TTK	848,840,000	24 orang	983,400,000	24 orang	1,401,000,000	26 orang	2,335,800,000
5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, telephone, dan aliran listrik	-	12 bulan (6 line telepon dan 1 rekening listrik)	345,400,000	12 bulan (6 line telepon dan 1 rekening listrik)	305,400,000	12 bulan (6 line telepon dan 1 rekening listrik)	120,000,000	-	-	-	-
6 Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase pemenuhan atas makanan	-	1.584 galon air mineral; 250 kg gula putih; 60 pak	125,000,000	1.584 galon air mineral; 60 pak teh; 60 bungkus	150,000,000	100%	140,000,000	100%	200,000,000	100%	150,000,000

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
	minuman harian pegawai, rapat, dan tamu		teh; 60 bungkus kopi; 100 toples kue kering; 1.505 dus makan rapat; 1.680 box snack rapat; 175 porsi makan prasmanan; 1 paket parcel buah		kopi; 100 toples kue kering; 1.505 dus makan rapat; 1.680 box snack rapat; 175 porsi makan prasmanan; 2 paket parcel buah; 100 kg gula putih							
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	-	6 jenis	145,000,000	15 jenis	135,000,000	15 jenis	130,000,000	20 jenis	150,000,000	20 jenis	170,000,000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	-	10 jenis	10,000,000	10 jenis	10,000,000	10 jenis	15,000,000				
9 Penataan Arsip	Persentase khasanah arsip in aktif dan status SKPD	-	-	-	-	-	-	-	100%	45,000,000	100%	45,000,000
10 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	450,000,000	-	-
11 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	-	8 orang	85,000,000	1 gedung (1.848 m2 gedung dan 1.091 m2 halaman)	100,000,000	-	-	-	-	-	-
12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	7 buah komputer/PC; 1 paket cable dan bracket projector; 4 unit mesin tik elektrik; 1 unit papan struktur	150,000,000	2 unit mesin tik elektrik; 8 unit komputer PC; 6 unit printer; 24 buah calculator; 24 buah flash disk; 6 buah hard	175,000,000	-	-	-	-	-	-

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
			organisasi; 5 unit printer infus		disk eksternal; 12 buah mouse; 10 buah keyboard computer							
13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyampaian jasa surat-surat dinas	-	60 kali dan 5 orang	10,000,000	-	-	-	-	-	-	100%	7,000,000
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>1,285,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>705,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>962,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>955,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>315,000,000</b>
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	-	1 unit plang nama dinas, gordyn, perlengkapan sound system, mesin penghitung uang, bricket projector motorized	156,500,000	2 Jenis (1 paket perlengkapan dapur, 6 unit AC)	150,000,000	-	-
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	-	4 unit projector LCD, 1 set sound system, 9 jenis perlengkapan dapur	75,000,000	4 unit mesin penghancur kertas; 4 unit AC; 1 unit layar projector besar; 1 unit projector sedang; 2 unit camcoder; 2 unit kamera mirror less; 1 unit pompa jet pump	150,000,000	6 unit komputer PC, 6 unit printer, dan 25 unit meja/kursi kerja staf	366,000,000	27 unit	250,000,000	-	-
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 yang dipelihara	-	12 bulan; 12 unit kendaraan roda 4; 17 unit kendaraan roda 2	325,000,000	28 unit kendaraan	340,000,000	13 unit roda 2 dan 14 unit roda 4	225,000,000	27 unit (13 unit roda 2 dan 14 unit roda 4)	240,000,000	27 unit (13 unit roda 2 dan 14 unit roda 4)	240,000,000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan	Jumlah jenis sarana dan prasarana	-	9 jenis	30,000,000	7 jenis	20,000,000	11 jenis	70,000,000	2 jenis/12 bulan	115,000,000		

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
Gedung Kantor	aparatur yang dipelihara											
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan gedung kantor yang dipelihara	-	55 unit	30,000,000	55 unit	20,000,000	55 unit	20,000,000	12 bulan	50,000,000	55 unit	75,000,000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan berkala gedung kantor	-	1 gedung kantor	75,000,000	1 gedung kantor (2 lantai)	175,000,000	1 gedung kantor	125,000,000	5 bidang	150,000,000	-	-
7 Penataan Gedung Bappeda	- Jumlah gedung kantor Bappeda yang tertata	-	1 gedung kantor	750,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	-	<b>100%</b>	<b>130,000,000</b>	<b>100</b>	<b>155,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>170,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>355,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>200,000,000</b>
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian/bahan pakai seragam	-	570 meter (6 meter/orang)	80,000,000	95 stel pakaian batik; 95 stel pakaian adat	80,000,000	190 stel	85,500,000	110 stel	95,000,000		
2 Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah pakaian olahraga	-	90 stel	50,000,000	92 stel	75,000,000	95 stel	85,000,000	110 stel	190,000,000	110 stel	200,000,000
3 Pengadaan Pakaian Dinas Harian	Jumlah Pakaian Dinas Harian	-							110 stel	70,000,000		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	-	<b>100%</b>	<b>90,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>60,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>90,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>110,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>110,000,000</b>
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	-	7 orang	20,000,000	7 orang	-	5 orang	30,000,000	22 orang	60,000,000	5 orang	60,000,000

**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
2 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan	-	74 orang	70,000,000	54 orang	60,000,000	17 orang	60,000,000	20 orang	50,000,000	17 orang	50,000,000
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	-	<b>100%</b>	<b>230,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>340,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>291,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>312,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>20,000,000</b>
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD, dokumen Penetapan Kinerja SKPD, dan laporan capaian kinerja SKPD	-	3 dokumen (6 buku)	60,000,000	3 dokumen perencanaan SKPD, 1 laporan penetapan kinerja SKPD, dan 2 laporan capaian kinerja SKPD	170,000,000	3 dokumen (1 dokumen Renja, 1 dokumen perjanjian kinerja, dan 1 dokumen LAKIP)	80,000,000	3 dokumen (1 dokumen Renja, 1 dokumen perjanjian kinerja, dan 1 dokumen LAKIP)	126,500,000	3 dokumen (1 dokumen Renja, 1 dokumen perjanjian kinerja, dan 1 dokumen LAKIP)	10,000,000
2 Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	-	-	-	-	-	3 jenis laporan (bulanan, semesteran, dan tahunan)	211,000,000	3 jenis laporan (bulanan, semesteran, dan tahunan)	186,000,000	3 jenis laporan (bulanan, semesteran, dan tahunan)	10,000,000
3 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	Jumlah laporan keuangan bulanan	-	1 dokumen (60 buku)	110,000,000	12 laporan (60 buku)	110,000,000	-	-	-	-	-	-
4 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	-	1 dokumen (15 buku)	30,000,000	1 dokumen (15 buku)	30,000,000	-	-	-	-	-	-



**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
5 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	-	1 dokumen (30 buku)	30,000,000	1 dokumen (30 buku)	30,000,000	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>16,370,181,400</b>		<b>17,029,240,000</b>		<b>17,364,785,000</b>		<b>19,083,500,000</b>		<b>22,322,800,000</b>

Dalam mencapai visi dan misi, Bappeda Kota Bekasi menetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran strategis antara lain sebagai berikut:

1. Persentase kesesuaian Program RPJMD ke dalam RKPD.  
Rumus perhitungan: Jumlah program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah keseluruhan program dalam RPJMD, dikali 100%.
2. Persentase kesesuaian Program RKPD ke dalam APBD.  
Rumus perhitungan: Jumlah program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah keseluruhan program dalam RKPD, dikali 100%.
3. Persentase kesesuaian Program RENSTRA terhadap RPJMD  
Rumus perhitungan: Jumlah program dalam RENSTRA yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah keseluruhan program dalam RPJMD, dikali 100%.
4. Persentase kesesuaian Program RENJA terhadap RKPD.  
Rumus perhitungan: Jumlah program dalam RENJA yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah keseluruhan program dalam RKPD, dikali 100%.
5. Persentase usulan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang yang diakomodir dalam RKPD.  
Rumus perhitungan: Jumlah usulan kegiatan dari masyarakat dalam musrenbang (kelurahan, kecamatan dan kota) dibagi dengan Total kegiatan Belanja Langsung dalam RKPD, dikali 100%.
6. Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tingkat kota yang ditindaklanjuti dalam dokumen rencana pembangunan daerah.  
Rumus perhitungan: Jumlah rekomendasi dalam evaluasi RKPD yang ditindaklanjuti dalam dokumen rencana pembangunan tahun rencana dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi dikali 100%.
7. Persentase jumlah data yang tervalidasi dan terbaru;  
Rumus perhitungan: Jumlah data yang tervalidasi dan terbaru dibagi dengan jumlah data yang harus divalidasi dan diperbarui dikali 100%.
8. Persentase aparatur perencana yang memperoleh sertifikat keahlian di bidang perencanaan.  
Rumus perhitungan: Jumlah aparatur perencana yang memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan dibagi dengan total aparatur Bappeda Kota Bekasi, dikali 100%.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Rumus perhitungan: IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Bappeda adalah Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai responden dalam Survey Pelayanan Publik Bappeda.

10. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappeda dari Inspektorat.

Rumus perhitungan: Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (>85), A (>75-85), B (>65-75), CC (>50-65), C (>30-50), dan D (0-30).

Selain indikator sasaran strategis tersebut, Bappeda Kota Bekasi juga menetapkan indikator program yang merupakan penjabaran dari indikator sasaran strategis sebagaimana tertuang di dalam Tabel 5.1.

Dalam setiap sasaran strategis Bappeda Kota Bekasi, ditetapkan target kinerja yang harus dicapai oleh Bappeda Kota Bekasi tahun 2013-2018. Berikut rincian target kinerja dari masing-masing sasaran strategis Bappeda Kota Bekasi.

**1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah.**

Pada sasaran strategis yang pertama terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu:

- 1) Persentase kesesuaian Program RPJMD ke dalam RKPD;
- 2) Persentase kesesuaian Program RKPD ke dalam APBD;
- 3) Persentase kesesuaian Program RENSTRA terhadap RPJMD;
- 4) Persentase kesesuaian Program RENJA terhadap RKPD.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Bappeda Kota Bekasi melaksanakan 4 (empat) program (Program Perencanaan Pembangunan, Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam).

Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2018 yaitu:

- 1) Sebesar 100% untuk indikator “Persentase kesesuaian Program RPJMD ke dalam RKPD”;
- 2) Sebesar 95% untuk indikator “Persentase kesesuaian Program RKPD ke dalam APBD”.
- 3) Sebesar 100% untuk indikator “Persentase kesesuaian Program RENSTRA terhadap RPJMD;
- 4) Sebesar 100% untuk indikator “Persentase kesesuaian Program RENSTRA terhadap RPJMD;

**2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.**

Pada sasaran strategis yang kedua terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu “Persentase usulan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang yang diakomodir dalam RKPD”.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Bappeda Kota Bekasi melaksanakan Program Perencanaan Pembangunan. Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 30% usulan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang yang diakomodir dalam RKPD.

**3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya responsivitas terhadap permasalahan pembangunan yang tercakup dalam dokumen perencanaan.**

Pada sasaran strategis yang ketiga terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai yaitu: “Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tingkat kota yang ditindaklanjuti dalam rencana pembangunan daerah.

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Bappeda melaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Target kinerja akhir indikator kinerja sasaran tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 95% rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tingkat kota yang ditindaklanjuti dalam rencana pembangunan daerah.

**4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan.**

Pada sasaran strategis yang keempat terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu “Persentase data yang tervalidasi dan terbaru”.

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Bappeda Kota Bekasi melaksanakan Program Pengembangan Data dan Informasi.

Adapun data-data yang dihasilkan antara lain:

1) Data hasil pembangunan:

- Bekasi Dalam Angka;
- Indeks Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan Ekonomi Kota Bekasi;
- Indikator Kesejahteraan Kota Bekasi;
- Indeks Pembangunan Daerah Kota Bekasi;

2) Data Spasial

3) Sistem Informasi

- Sistem Kendali Institusi Permodalan Kota Bekasi;
- Sistem *E-Monev* dalam Perencanaan Pembangunan;
- Sistem *E-Planning* dalam Perencanaan Pembangunan;
- *E-Database* Sistem Perencanaan Pembangunan: Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) Kemendagri dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) Kota Bekasi;
- Sistem perencanaan pembangunan bidang pendidikan;
- Sistem informasi terkait kemiskinan.

Target kinerja akhir indikator kinerja sasaran tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 75% data yang tervalidasi dan terbaru.

**5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kemampuan, pengetahuan dan disiplin aparatur.**

Pada sasaran strategis yang kelima terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu: “Persentase aparatur perencana yang memperoleh sertifikat keahlian di bidang perencanaan”. Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Bappeda Kota Bekasi melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 15% aparatur perencana yang memperoleh sertifikat keahlian di bidang perencanaan.

**6. Sasaran Strategis 6: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.**

Pada sasaran strategis yang keenam terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Untuk mencapai sasaran strategis yang keenam tersebut, Bappeda Kota Bekasi melaksanakan 5 (lima) program, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, serta Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan).

Target kinerja akhir indikator kinerja tersebut yang ingin dicapai pada tahun 2018 yaitu:

- 1) Sebesar 100% untuk indikator “IKM”; dan
- 2) Predikat A untuk indikator “Nilai AKIP”.

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN PENUTUP SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000) atau suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Dengan demikian, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja (*performance indicator*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sementara ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi, dalam RPJMD tahun 2013-2018 telah ditetapkan kebijakan, program kerja, sasaran, indikator kinerja serta target yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh SKPD. Dalam Tabel 6.1 berikut disampaikan indikator kinerja serta target yang harus dicapai oleh Bappeda Kota Bekasi yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Bappeda Kota Bekasi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Hasil Review

Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap dokumen rencana pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi	-	-	-	-	-	100%	100%
Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kota Bekasi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD	74	81%	95%	95%	95%	100%	100%
Persentase Kesesuaian Program RKPD dengan APBD	93,64	95%	95%	100%	100%	100%	100%
Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Sektor Ekonomi Kota Bekasi	-	-	-	-	-	100%	100%
Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor Ekonomi Kota Bekasi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan Sektor Ekonomi dengan RKPD	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Sektor Prasarana Wilayah dan SDA Kota Bekasi	-	-	-	-	-	100%	100%
Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor Prasarana Wilayah dan SDA Kota Bekasi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%



**RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 (PERUBAHAN III)**

Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2013)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan Sektor Prasarana Daerah dan SDA dengan RKPD	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presentase aparaturnya perencanaan yang memenuhi kompetensi jabatan perencanaan	-	-	-	70%	80%	100%	100%
Presentase Jumlah Data Primer yang tersedia, tervalidasi dan terbaru	-	-	-	70%	75%	80%	80%
Presentase Jumlah Data Sekunder yang tersedia, tervalidasi dan terbaru	-	-	-	40%	45%	50%	50%